

## V. PENUTUP

### SIMPULAN, FORMULASI, DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

1. Etika kepemimpinan Jawa, merupakan ajaran-ajaran yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari kebudayaan Jawa tentang kepemimpinan, yang dapat dijadikan sebagai pedoman menata kehidupannya. Sumber-sumber ajaran itu ada yang tertulis seperti *Serat Wulang Reh* dan *Serat Wedhatama*, tetapi ada yang berasal dari sumber lisan (walaupun terdokumentasi) seperti ajaran *Hasta Brata*, *Tri Dharma* dari KGPAA Mangkunegara I dan Ajaran Ki Hajar Dewantara. Ajaran-ajaran itu berada dalam dunia simbolik, tetapi ajaran-ajaran itu juga dapat muncul dari dunia empiris atau dunia pengalaman masyarakat Jawa.
2. Dalam ajaran *Hasta Brata*, manusia yang disebut sebagai pemimpin, memiliki karakteristik yang terpuji, dan yang paling dasar adalah **keikhlasan**, termasuk amanah, kesabaran, kejujuran, rela berkorban, dan berlapang dada, seperti sifat bumi sebagai penyangga utama kehidupan manusia. Watak **keteladanan**, termasuk kesetiaan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran, seperti matahari sebagai penunjang kehidupan manusia. Memberikan **pencerahan**, termasuk membesarkan hati orang yang dipimpin, seperti halnya bulan. **Pemberi petunjuk**, pengarahan dan motivasi bagi bawahan, seperti bintang. Pemimpin mesti **berwibawa**, termasuk adanya kharisma yang dimilikinya, ibarat mega. **Empati** yang tinggi, yaitu kemampuan merasakan dan memikirkan terhadap apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh mereka yang dipimpin, sebagai persyaratan yang harus dimiliki oleh pemimpin, ibarat angin. **Berwawasan luas**, seperti samudera, tentunya juga menjadi persyaratan bagi sang pemimpin. Selain itu, pemimpin sudah semestinya mempunyai **sikap tegas**, yang diibaratkan seperti api. Dengan demikian, secara ringkas dapat diketengahkan, bahwa konsep kepemimpinan menurut ajaran *Hasta Brata*, yang berfokus pada kepribadian sang pemimpin, memiliki

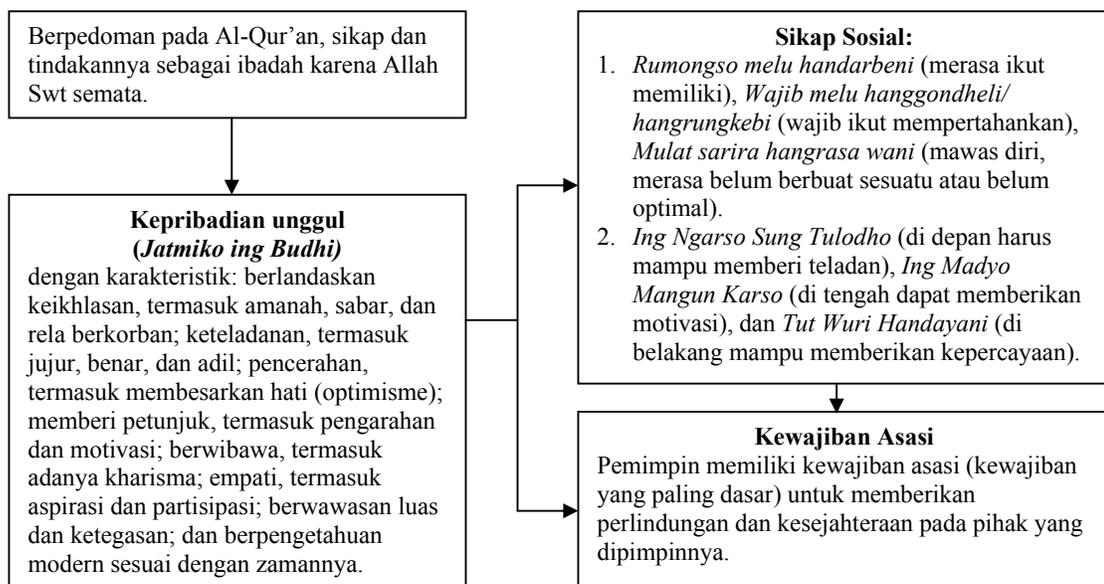
karakteristik: keikhlasan, keteladanan, pencerahan, memberi petunjuk, berwibawa, empati, berwawasan luas, dan sikap tegas.

3. Sejak berdirinya Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, (II-Islam), Kasunanan Kartasura, hingga Kasunanan Surakarta, Islam telah dijadikan agama negara. Tetapi intensitas keagamaan yang tinggi terjadi pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwana IV, Raja Karaton Kasunanan Surakarta, dengan menegakkan Syari'ah Islam di lingkungan keraton. *Serat Wulang Reh*, salah satu karya Paku Buwana IV, yang termasyhur hingga saat ini dan menjadi salah satu pegangan hidup di kalangan priyayi. *Serat Wulang Reh* berisi ajaran-ajaran Islam dalam bentuk tembang. Secara tegas, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam bernegara dan bermasyarakat, melaksanakan rukun Islam yang tentunya sebagai perwujudan dari rukun iman, dan seterusnya. Karena itu, seorang pemimpin harus mampu memahami dan menghayati isi dan inti ajaran Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Sementara itu, ajaran yang ada dalam *Serat Wedhatama*, karya Mangkunegara IV, terutama berfokus pada pengembangan watak dan kepribadian. Selain olah bathin, unsur-unsur modernitas yang menekankan pada ajaran itu. Hal demikian, merefleksikan alam pikiran Mangkunegara IV sebagai seorang modernis yang beriman.
4. Ajaran Tri Dharma dari Mangkunegara I, yang terdiri dari: a. *Rumongso melu handarbeni* (merasa ikut memiliki), b. *Wajib melu hanggondheli/hangrungkebi* (wajib ikut mempertahankan), c. *Mulat sarira hangrasa wani* (mawas diri, merasa belum berbuat sesuatu atau belum optimal). Ajaran Tri Dharma pernah diusulkan sebagai dasar falsafah hubungan industrial Pancasila, yang mengatur hubungan antara pekerja, manajemen, dan pemerintah. Karena itu, ajaran Tri Dharma sebagai kearifan klasik cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ajaran Tri Dharma yang intinya adalah semangat pengabdian pada negara dan tanah air, yang utamanya ditujukan kepada para pemimpin, yang selanjutnya juga rakyat pada umumnya. Sementara itu, kearifan lokal (Jawa), yang sudah menjadi ajaran nasional, yaitu ajaran kepemimpinan Ki Hajar

Dewantara, yang isinya: *Ing Ngarso Sung Tulodho* (di depan harus mampu memberi teladan), *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah dapat memberikan motivasi), dan *Tut Wuri Handayani* (di belakang mampu memberikan kepercayaan). Baru sebagian saja ajaran Ki Hajar Dewantara yang diadopsi secara formal, baik sebagai asas hukum maupun sebagai lambang instansi pemerintah, yaitu konsep “*Tut Wuri Handayani*”. Unsur ajaran yang lain, walaupun telah disosialisasikan dalam berbagai forum, tetapi intensitasnya masih terbatas.

5. Bekerja dari pengalaman sejarah sosial masyarakat Jawa, yang masih kontekstual hingga saat ini, yang memuat *message* (isi pesan) yang luhur tentang ajaran kepemimpinan yang menyangkut hubungan antara pemimpin dengan bawahan (orang yang dipimpin), yang bersifat timbal-balik. Pola hubungan ini berbasis pada hubungan patron-klien pada zaman patrimonial pada masa lampau, dengan perubahan dan kelangsungan makna hubungan itu, yang masih terasa hingga saat sekarang ini dalam dunia realitas. Di satu pihak, bawahan (pihak yang dipimpin) memberikan loyalitas tinggi kepada pemimpinnya, dan di pihak lain, pemimpin harus mampu memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan pada pihak yang dipimpinnya. Selanjutnya, disampaikan rekonstruksi Etika Kepemimpinan Jawa, dalam bentuk skema berikut ini:

Skema 2:  
Rekonstruksi Etika Kepemimpinan Jawa



## B. Formulasi

Fokus penelitian ini adalah Etika Kepemimpinan Jawa, sebagai salah satu kearifan lokal yang penting, yang dapat dijadikan bahan pengayaan substansi, khususnya asas-asas Hukum Progresif. Dari simpulan hasil penelitian tersebut, selanjutnya direkonstruksi ke dalam bahasa asas yang lebih ringkas dan terinci, dengan memperhatikan perkembangan masyarakat secara lebih kontekstual, sebagai berikut:

1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan “bagi yang beragama Islam”, dapat memahami isi Al-Qur’an dan Al-Hadits.
2. Memiliki kepribadian unggul, *Jatmika ing Budhi*, dengan karakteristik seperti keikhlasan, amanah, keteladanan, pencerahan, kewibawaan, empati, ketegasan, berwawasan luas, termasuk pengetahuan hukum dan masyarakat secara komprehensif.
3. *Rumongso melu handarbeni* (merasa ikut memiliki), *Wajib melu hanggondheli/ hangrungkebi* (wajib ikut mempertahankan), *Mulat sarira hangrasa wani* (mawas diri, merasa belum berbuat sesuatu atau belum optimal).
4. *Ing Ngarso Sung Tulodho* (di depan harus mampu memberi teladan), *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah dapat memberikan motivasi), dan *Tut Wuri Handayani* (di belakang mampu memberikan kepercayaan).
5. Kewajiban Asasi bagi pemimpin, termasuk pejabat-pimpinan, untuk senantiasa memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pihak yang dipimpin, dalam arti terbatas adalah bawahan langsung, dan dalam konteks yang lebih luas adalah rakyat pada umumnya.

## C. Rekomendasi

1. Kepada para pemikir hukum, yang berafinitas dan apresiatif terhadap Hukum Progresif, sebagai salah satu aliran hukum yang muncul dari bumi Indonesia, selain memberi pengayaan substansi karena sifat terbuka dari aliran ini, juga secara praktis mulai menata (mengorganisasikan) berbagai hal yang terkait dengan perkembangan Hukum Progresif yang tengah mencari bentuk.

2. Kepada Lembaga Negara dan instansi pemerintah yang berwenang, selain mengadopsi dan mengadaptasikan aliran hukum yang telah ada dan mapan, agar hukum Indonesia lebih membumi di tanah airnya sendiri memberikan apresiasi dan memfasilitasi pengembangan Hukum Progresif tersebut.